

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM  
MENINGKATKAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN  
PEREMPUAN DI DESA NAGA TIMBUL KECAMATAN  
TANJUNG MORAWA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AYU UTAMI**

**188520128**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/9/22

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM  
MENINGKATKAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN  
PEREMPUAN DI DESA NAGA TIMBUL KECAMATAN  
TANJUNG MORAWA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Dan Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Administrasi Publik Fakultas Sosial Dan Politik**

**Universitas Medan Area**

**OLEH :**

**AYU UTAMI**

**188520128**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)19/9/22

**LEMBAR PENGESAHAN**

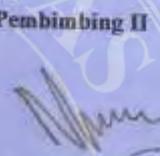
Judul Skripsi : Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pendidikan Dan Ketrampilan Perempuan Di Desa Naga Timbul Kecamatan tanjung morawa

Nama Mahasiswa : AYU UTAMI

NPM : 188520128

Program Studi : Administrasi Publik

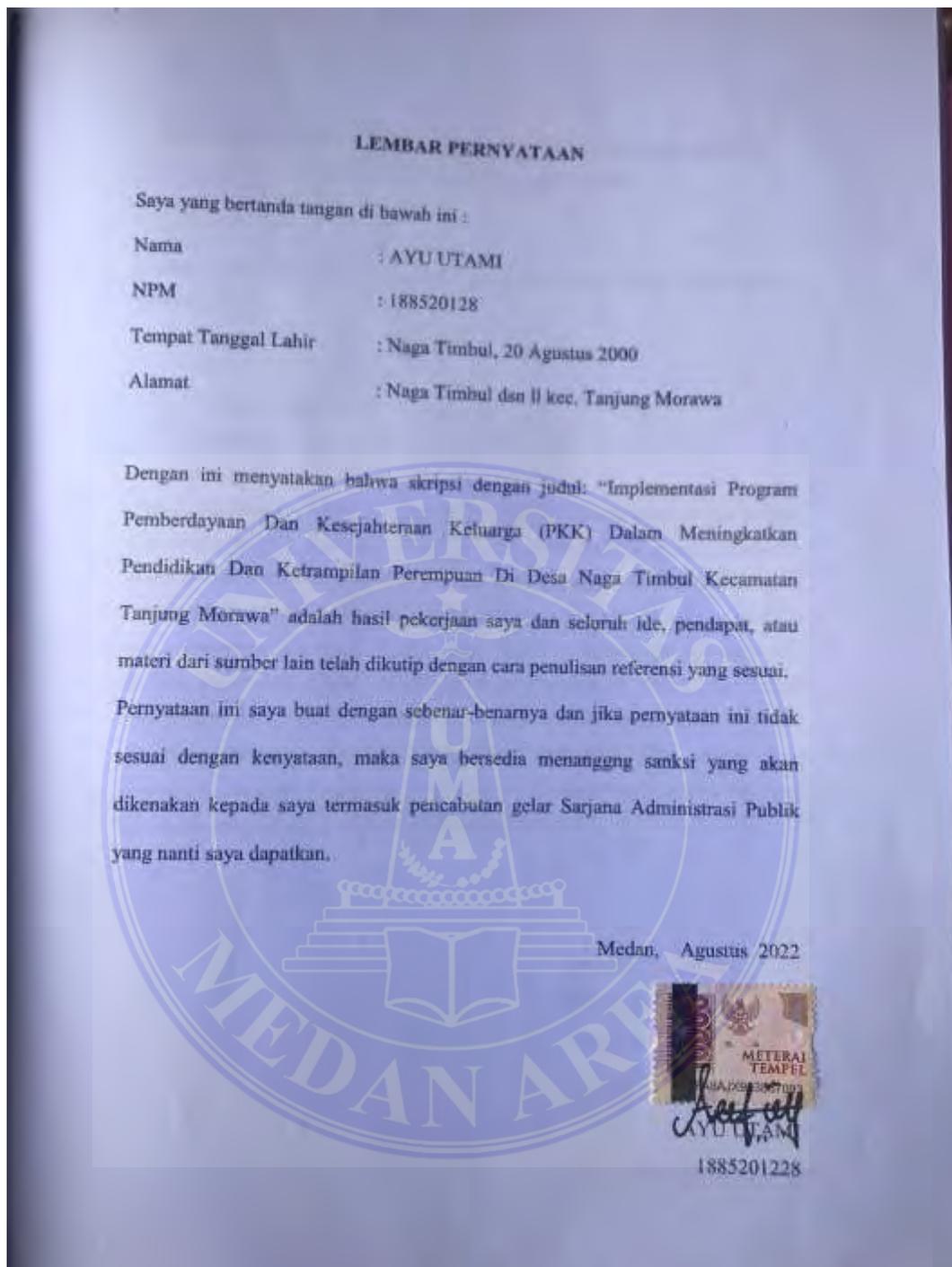
**Disetujui Oleh :**

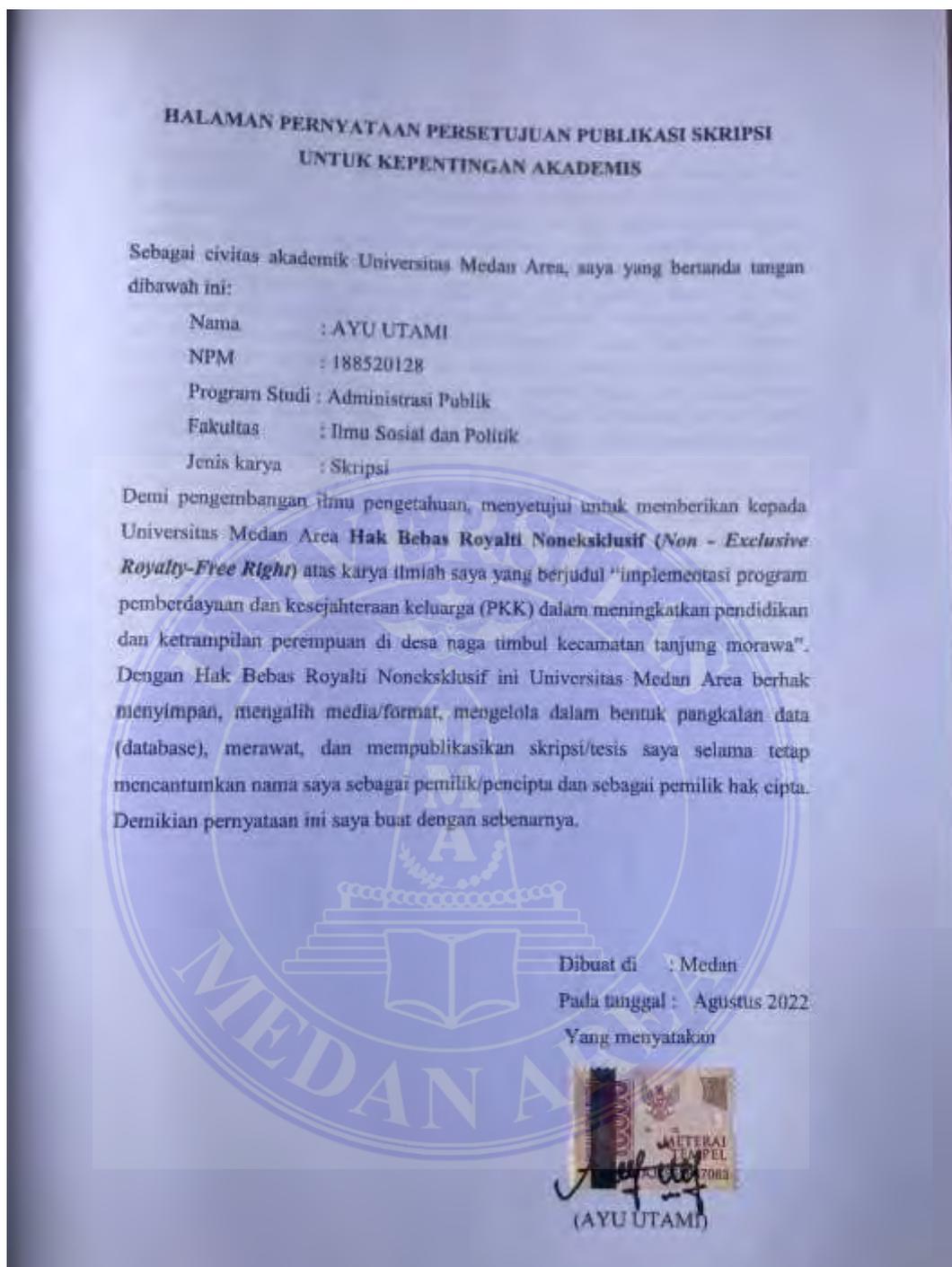
<b>Pembimbing I</b>  <b>Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP</b>	<b>Pembimbing II</b>  <b>Nina Angelia, S.Sos, M.Si</b>
--	---

**Mengetahui :**

<b>Dekan</b>  <b>Dr. Effiati Jualliana Hasibuan, M.Si</b>	<b>Ka. Prodi Administrasi Publik</b>  <b>Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol</b>
--	---

Tanggal LULUS : 12 Agustus 2021





## ABSTRAK

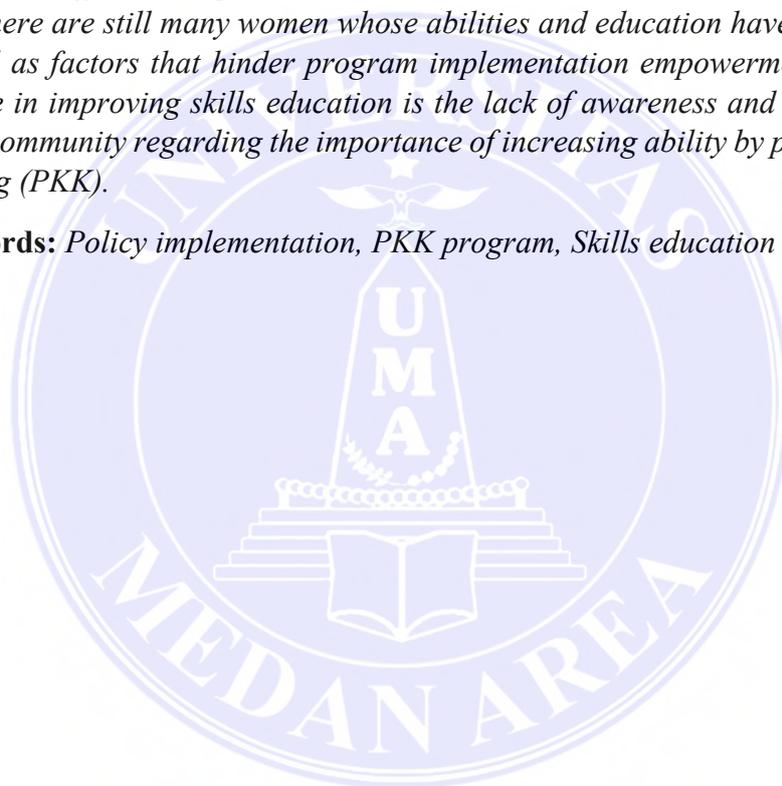
Implementasi merupakan bagian yang krusial bagi sebuah proses kebijakan serta proses ini bersinggungan dengan realiasi yang mengarah pada program yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa naga timbul serta faktor penghambat nya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan dan kegagalan dari suatu implementasi kebijakan ialah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa naga timbul belum sepenuhnya berjalan dengan baik, penelitian menunjukkan komunikasi baik, sumber daya cukup, disposisi cukup, dan struktur birokrasi tidak baik. Dan juga masih banyak perempuan-perempuan yang kemampuan dan pendidikan nya belum meningkat. Serta faktor penghambat implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam meningkatkan pendidikan ketrampilan ialah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya meningkatkan kemampuan dengan mengikuti pelatihan (PKK).

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan, Program PKK, Pendidikan Ketrampilan

## **ABSTRACT**

*Implementation is a crucial part of a policy process and this process intersects with reality that leads to pre-determined programs to achieve goals. The formulation of the problem in this research is how to implement the empowerment and family welfare program (PKK) in the village naga timbul and the inhibiting factors. The theory used in this research is Edward III theory which explains that the success and failure of a policy implementation are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The results of this study indicate that the implementation of the empowerment and family welfare program (PKK) in village Naga timbul has not yet fully gone well, the results of the study show good communication, sufficient resources, sufficient disposition, and the bureaucratic structure is not good and also there are still many women whose abilities and education have not improved as well as factors that hinder program implementation empowerment and family welfare in improving skills education is the lack of awareness and understanding of the community regarding the importance of increasing ability by participating in training (PKK).*

**Keywords:** *Policy implementation, PKK program, Skills education*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama Lengkap : AYU UTAMI  
Tempat, Tanggal Lahir : Naga Timbul, 20 Agustus 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Naga Timbul dsn II kec. Tanjung Morawa  
Status : Belum Menikah  
Email : ayuutamivivo2017@gmail.com  
No. Handphone : 082362240253

### Latar Belakang Pendidikan

2006 – 2012 : SD Mis AL-IKHLAS  
2012 – 2015 : SMP Negeri 3 GALANG  
2015 – 2018 : SMA Negeri 2 Lubuk Pakam  
2018 – 2022 : S1 Jurusan Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Politik  
Universitas Medan Area

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum wr.wbr*

Dengan segala puji dan rasa syukur kepada Allah SWT yang memberikan nikmat dan rahmat karunianya sehingga dengan izin dan kehendaknya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pendidikan Dan Ketrampilan Perempuan Di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa.”**

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar Sarjana pada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Sosial dan Politik Universitas Medan Area. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, masukan serta saran dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Kiranya bantuan, masukan-masukan serta saran yang diberikan akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kebajikan yang berlipat ganda.

Sehubungan dengan skripsi yang penulis laksanakan di Lingkup Kota Medan dalam proses penyusunannya, penulis banyak mendapatkan masukan serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Hasibuan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

3. Ibu khairunnisah Lubis S.Sos, M.I.Pol selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP selaku Dosen Pembimbing I selama proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II selama proses penyusunan skripsi.
6. Kepada Bapak Nasrullah Hidayat, S.pd, M.Sc selaku Sekretaris penulisan yang memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan selama menempuh pendidikan.
8. Bapak dan Ibu staff pegawai Administrasi Fakultas Sosial dan Politik Universitas Medan Area khususnya Program Studi Administrasi publik Bang Sutrisno dan Bang Riki.
9. Kepada Pegawai kantor desa naga timbul serta ibu-ibu PKK dan juga masyarakat desa naga timbul. yang telah memberikan arahan dan juga ijin dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teristimewa Kepada Kedua Orang Tua saya yang sangat saya hormati dan sayangi, Ayah Syahril dan Ibu suraidah yang senantiasa memberikan doa, semangat, dukungan dan materi kepada anaknya (Penulis) sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Buat Keluarga Cemana yang senantiasa memberikan doanya kepada penulis.
12. Kepada Sahabatku Tersantuy joyce, friska, aulia, syifa, putri sekar yang memberikan semangat, doa dan selalu setia menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang akhirnya sama-sama S.AP.
13. Untuk teman-teman seperjuangan dalam menyusun skripsi, khususnya kelas Administrasi Publik D yang selalu bersama-sama dalam suka dan duka di kampus yang sama-sama berjuang dalam penyusunan skripsi.
14. Kepada mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 2018 yang memberikan semangat dan dukungan.
15. Seluruh informan yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu per satu yang telah memberi semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh pembaca terhusus untuk Program Studi Administrasi Publik.

Medan, 12 Agustus 2022

Penulis

**AYU UTAMI**

**NPM : 188520128**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGHANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat penelitian .....	5
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Landasan Teori .....	6
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	6
2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan .....	7
2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan .....	8
2.1.4 Pengertian Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) .....	10
2.1.5 Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) .....	13
2.1.6 Pemberdayaan Perempuan .....	17
2.1.7 Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat .....	19
2.2 Penelitian Terdahulu .....	20
2.3 Kerangka Berpikir .....	23
<b>BAB</b>	
<b>III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
3.1 jenis penelitian .....	26

3.2 Lokasi Dan Penelitian .....	26
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	28
3.4 Metode Analisis Data .....	30
<b>BAB IV</b>	
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian .....	32
4.1.1 Geografis Desa Naga Timbul .....	32
4.1.2 Keadaan Ekonomi .....	33
4.1.3 Jumlah Penduduk Desa Naga Timbul .....	33
4.1.4 Potensi Sumber Daya Desa Naga Timbul .....	34
4.1.5 Struktur Organisasi .....	34
4.1.6 Visi Dan Misi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ..	36
4.1.7 Tujuan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	37
4.2 Pembahasan .....	37
4.2.1 Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pendidikan Dan Ketrampilan .....	37
4.2.2 Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pendidikan Dan Ketrampilan Perempuan Di Desa Naga Timbul .....	55
<b>BAB V</b>	
<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
5.1 KESIMPULAN .....	59
5.2 SARAN .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

3.2 Waktu Penelitian .....	27
4.1.1 Perbatasan Desa Naga Timbul .....	32
4.1.3 Jumlah Penduduk Desa Naga Timbul .....	33
4.2.1 Jumlah Anggaran Kegiatan Ketrampilan PKK.....	48



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.3 Kerangka Pemikiran .....	25
Bagan 4.1.5 Struktur Organisasi .....	35



## Daftar Gambar

Gambar 4.2.1 Hasil Ketrampilan .....	42
--------------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan peraturan pemerintah dalam negeri (pemedagri) Nomor 5 tahun 2007 mengenai pedoman penataan lembaga kemasyarakatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) yang mempunyai program untuk membantu pemerintah desa dan kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, berbahagia, sejahtera, maju, mandiri, bermartabat dan harmonis. Serta mempunyai peran dalam menumbuh kembangkan potensi dan juga peran perempuan dalam meningkatkan pendidikan dan ketrampilan untuk membantu pendapatan keluarga.

Pada pertengahan tahun 1950 gerakan (PKK) timbul dari usaha ekonomi rumah tangga yang diajarkan di pusat pelatihan kesejahteraan keluarga oleh pendidikan masyarakat, gerakan yang dihimpun oleh para perempuan dan juga ibu rumah tangga yang ingin ikut aktif, bekerja keras, bekerja cerdas, serta bekerja ikhlas. Gerakan (PKK) berusaha membuat keluarga sejahtera dan juga meningkatkan derajat kaum perempuan, (PKK) juga menekankan pada tanggung jawab perempuan sebagai ibu rumah tangga yang melahirkan serta membangun generasi penerus bangsa.

Ada sepuluh (10) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) yang hakekatnya merupakan kebutuhan dasar manusia yang meliputi penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan,

kesehatan, pengembangan kehidupan, berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat. Dan untuk melaksanakan sepuluh (10) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dilakukan oleh empat (4) kelompok kerja secara luwes dan koordinatif yaitu: pokja I, pokja II, pokja III, dan pokja IV.

Sumber pembiayaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) didasakan pada swadaya serta partisipasi dari masyarakat, peran bantuan pemerintah dan juga bantuan dari sumber daya yang lainnya yang sifatnya sebagai pendorong serta perangsang untuk terus tumbuh dan berkembang. Bantuan pemerintah dalam keadaan maupun kondisi tertentu merupakan faktor pendorong untuk menumbuh kembangkan kreatifitas dan aktifitas masyarakat.

Pemerintah rutin dan terus menerus melakukan program-program yang bertujuan dapat meningkatkan mutu serta kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing sehingga taraf ekonomi yang tadinya rendah dapat berangsur membaik. Mengingat keterbatasan baik faktor ekonomi, kondisi sosial, kualitas pendidikan, motivasi dan lainnya maka harus disiapkan sesuai program khusus untuk menjawab keterbatasan-keterbatasan yang ada.

Pengetahuan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) diperlukan untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih unggul dan berdaya guna, kelompok (PKK) di desa naga timbul kecamatan tanjung morawa merupakan salah satu program untuk meningkatkan pendidikan ketrampilan perempuan di desa naga timbul. Tujuan diadakannya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) ini yaitu untuk meningkatkan kualitas serta kemampuan perempuan di desa naga timbul, dan

juga memperbaiki kualitas ekonomi, sandang, pangan, dan juga papan. Serta membiasakan untuk merencanakan segala sesuatu dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga agar mampu memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) dengan baik.

Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) sendiri sudah dinilai berjalan baik dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan namun disisi lain, jika dilihat dari sumber daya manusia (SDM) yang tersedia belum semuanya mempunyai kompetensi dan juga kemampuan dalam menerapkan, menjalankan, dan membimbing masyarakat. Faktor lain yang menjadi permasalahannya karena masih ada anggota dan ibu-ibu di desa yang tidak mau melibatkan diri atau pun berpartisipasi, disisi lain nya juga sangat kurangnya sosialisasi yang membuat masyarakat kurang tertarik dan tidak mau melibatkan diri dalam program ini.

Melalui adanya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa naga timbul kecamatan tanjung morawa diharapkan dapat membantu proses pembangunan nasional dalam konteks pemberdayaan masyarakat yang melibatkan perempuan di desa naga timbul sebagai penggeraknya melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) pemantauan serta evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipasi kesadaran kritis serta kemandirian keluarga khususnya perempuan dapat tumbuh dan berkembang sehingga perempuan bukan lagi sebagai sebuah objek melainkan sebagai subjek pemberdayaan masyarakat. Sehingga dapat menciptakan dan meningkatkan pendidikan ketrampilan

perempuan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terkait upaya meningkatkan kualitas hidup kemandirian dan kesejahteraan.

Berdasarkan sumber diatas disimpulkan bahwa program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat namun, pada kenyataanya pada bidang sosial masyarakat desa naga timbul khususnya perempuan masih relatif rendah berdasarkan pendidikan, tingkat kreatifitas, ekonomi serta kemauan masyarakat masih rendah sosialisasi yang digunakan untuk para kader (PKK) juga masih kurang.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pendidikan Dan Ketrampilan Perempuan Di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa?
2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa naga timbul kecamatan tanjung morawa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa naga timbul kecamatan tanjung morawa.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, disamping sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tugas akhir program studi administrasi publik juga diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti dalam bidang program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) serta menambah wawasan penelitian dalam melihat keterlibatan masyarakat khususnya perempuan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)
2. Dari manfaat teoritis tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, sehingga dapat dijadikan bahan rujukan mahasiswa lain. Dan sebagai masukan bagi pihak akademik, serta bahan informasi tambahan referensi bagi mahasiswa lainnya yang ingin membuat skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu para tokoh masyarakat dan para kader (PKK)

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Pada dasarnya kebijakan merupakan suatu rangkaian yang siap untuk dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang akan bermuara pada keputusan mengenai alternatif terbaik. Definisi kebijakan publik secara konseptual dapat dilihat pada kamus Administrasi Publik Chandler dan piano dalam pasalog (2014:38), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah, bahkan Chandler dan piano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Thomas R Dye dalam pasalog (2014:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”, dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objeknya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Pakar inggris, W.I Jenkis dalam abdul wahab (2014:15), merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: *“A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specifid situation where these decisions should, in principle, be whitin the power of these actors to achieve”* (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batasan-batasan kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa: satu kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, dua kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, ketiga kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah satu kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk *rill* bukan untuk sekedar dinyatakan, kedua kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

### **2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi ialah sebuah proses melaksanakan kegiatan menjadi suatu tindakan dari politik ke dalam administrasi serta pengembangan suatu kebijakan didalam rangka penyempurnaan suatu program (Harsono, 2002).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah suatu cara untuk sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan suatu kebijakan politik maka langkah yang ada yaitu: langsung mengimplementasikan nya dalam bentuk program-program implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat maupun kelompok-kelompok pemerintah dan juga swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan kebijakan. (Riant, 2003)

Sedangkan menurut purwanto dan sulistyastuti implementasi pada dasarnya ialah sebuah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya mewujudkannya tujuan kebijakan. tujuan kebijakan diharapkan mampu akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

### **2.1.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III dalam subarsono (2005:90) ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan implementasi suatu kebijakan, diantaranya: sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi dan disposisi.

1). Sumber daya, merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah implementasi kebijakan yang baik, indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya dapat mempengaruhi kebijakan. Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia yakni implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya kebijakan hanyalah sebuah kertas yang akan menjadi dokumen.

2). Komunikasi, merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi juga sangat menentukan sebuah keberhasilan terhadap suatu pencapaian tujuan dari implementasi publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana apabila para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan, informasi para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

3). Disposisi, (kecenderungan atau tingkah laku) merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif, jadi disposisi ialah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran serta sifat demokratis. Bila implementor mempunyai disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang akan diinginkan oleh pembuat kebijakan. Jika implementor memiliki sifat ataupun persepektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi terhambat dan tidak berjalan efektif.

4). Struktur birokrasi, memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap implementasi kebijakan salah satu aspek dari struktur birokrasi adalah adanya SOP (*standart oprating procedure*), SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam melakukan tindakan. Struktur organisasi yang sangat panjang cenderung akan membuat pengawasan melemah dan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks pada akhirnya akan menimbulkan aktifitas organisasi tidak berjalan dengan efektif.

#### 2.1.4 Pengertian Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) ialah sebuah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat yang menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa. Serta berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri,berkesejahteraan dan berkeadilan gender serta berkesadaran hukum dan lingkungan.

(PKK) sebagai pergerakan pembinaan masyarakat yang dimulai dari seminar *home economic* di bogor pada tahun 1957 dan diberi mata pelajaran pendidikan kesejahteraan keluarga pada tahun 1961 dan menghasilkan sepuluh (10) segi kehidupan yaitu *family relation* (hubungan dalam keluarga), *child care* (membimbing dan mengasuh anak), *food* (makanan), *clothing* (pakaian), *housing* (perumahan), *health* (kesehatan), *family income* (keuangan keluarga), *home management* (tata laksana rumah

tangga), *home security* (keamanan lahir dan batin), *sound planning* (perencanaan yang baik).

Surat kawat mendagri No. SUS 3/6/12 pada tanggal 27 desember tahun 1972, pendidikan dirubah menjadi pembinaan serta dilaksanakan diseluruh Indonesia, selanjutnya tanggal 27 Desember ditetapkan sebagai hari kesatuan gerakan PKK. TAP MPR No. 11/MPR No. 1/MPR/1978 mengamanatkan kaum wanita untuk mewujudkan keluarga sejahtera. TAP MPR No. IV/MPR/1984 PKK sebagai salah satu wahana P2W dalam upaya mensejahterakan keluarga. Adanya pengakuan keberhasilan PKK baik oleh masyarakat, pemerintah maupun lembaga internasional seperti *Mauries pate* (UNICEF), *Sasakawa Health Prize award* (WHO), *Nouuma Litaricy* (UNESCO), Keberhasilan PIN (depkes), Raskenaslub PKK tanggal 31 oktober 2000 di bandung menghasilkan beberapa kesepakatan, yang terpenting adalah perubahan pembinaan kesejahteraan keluarga menjadi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK).

Pengertian diatas disimpulkan bahwa pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) upaya untuk menjelaskan masyarakat khususnya perempuan dengan kemampuan memperbaiki serta meningkatkan kedudukan dalam masyarakat serta dapat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan betaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlaq mulia dan berbudi luhur, sehat, maju dan mandiri, berkesetaraan gender serta berkesadaran hukum dan lingkungan. Namun perempuan juga tidak terlepas dari beberapa permasalahan oleh karena itu pemberdayaan perempuan perlu

dilakukan. Berikut ialah gambaran masalah sosial yang terjadi pada perempuan:

- a. Isu pada penanganan sosial perempuan merupakan bagian dari kelima isu yang ditangani dibidang perlindungan perempuan seperti yang sudah diamanatkan dalam peraturan presiden Nomor 5 Tahun 2010 rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
- b. Isu penanganan masalah sosial perempuan meliputi isu terkait dengan penanganan masalah sosial perempuan di daerah rawan konflik dan bencana alam, perempuan lanjut usia, perempuan penyandang disabilitas dan pornografi.
- c. Isu penanganan masalah sosial perempuan adalah isu yang penanganan dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang (cross-cutting issues) dan diselenggarakan secara terkoordinasi.

Konsep pemberdayaan (empowering) dalam pendidikan luar sekolah di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh kindervaltter yang memandang bahwa pemberdayaan sebagai proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan warga belajar terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik, sehingga pada akhirnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukan dalam masyarakat, dan secara historis konsep pemberdayaan telah mengalami perkembangan.

### 2.1.5 Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pada tahun 1967 istri gubernur Jawa Barat (ibu istriati Moenadi) mengembangkan sepuluh (10) segi kehidupan (PKK) yang meliputi penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang perumahan, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan beroprasi, kelestarian hidup, perencanaan sehat.

Dari sepuluh (10) program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) diatas, peneliti menitik beratkan pada satu program yaitu pendidikan dan ketrampilan perempuan di desa Naga timbul kecamatan Tanjung Morawa. Pendidikan dan ketrampilan yang berorientasi pada pengembangan ketrampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Diberikan bekal kepada ibu-ibu yang ingin mengikuti pelatihan untuk memberi pengetahuan ketrampilan serta untuk menumbuhkan sikap mengola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha, tujuan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) secara umum ialah dalam kurun waktu yang akan datang akan mampu mendorong kemandirian terutama perempuan dalam meningkatkan pendidikan dan ketrampilan untuk membangun keratifitas serta pembangunan desa.

a. Pokja I sebagai pelaksana kegiatan program:

1. Penghayatan dan pegamalan pancasila

Penghayatan dan pengamalan pancasila dengan menumbuhkan ketahanan keluarga melalui kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilaksanakan pemahaman secara terpadu. Pembinaan kesadaran bela Negara (PKBN) mencakup lima (5) unsur yaitu kecintaan tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan atas pancasila, kerelaan berkorban untuk bangsa dan Negara serta memiliki kemampuan awal bela Negara.

2. Gotong royong

Gotong royong dilaksanakan dengan membangun kerja sama yang baik, menumbuhkan kesadaran, kesetia kawan sosial, bertenggang rasa, kebersamaan menghormati antar umat beragama antar sesame keluarga, kelompok untuk mewujudkan semangat pesatuan dan kesatuan. Memberdayakan lanjut usia agar dapat menjaga kesehatan fisik dan mental, kebugaran, ketrampilan agar dapat melaksanakan kegiatan secara produktif dan menjadi teladan bagi keluarga dan lingkungannya serta berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan bakti, kegiatan tentara manunggal membangun desa (TTMD).

b. Pokja II sebagai pelaksana program :

1. Pendidikan dan ketrampilan

Pendidikan dan ketrampilan mempunyai prioritas program meningkatkan kemampuan yang berkaitan dengan

pengetahuan, kesadaran dan ketrampilan keluarga yang mempunyai anak balita mengenai tumbuh kembang anak balita secara optimal sebagaimana melaksanakan dan mengembangkan kegiatan program bina keluarga balita (BKB). Meningkatkan mutu dan jumlah pelatihan PKK dengan mengadakan pelati/training of trainer (TOT). meningkatkan pengetahuan TP PKK dalam kegiatan pos PAUD melalui kegiatan PAUD yang diintegrasikan dengan BKB dan posyandu dengan perteman mitra PAUD bekerja sama dengan pokja IV dan meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan kader dalam mendidik anak usia dini. Meningkatkan kejar paker A,B, dan C dengan penyuluhan wajib belajar pendidikan Sembilan tahun dan pengembangan keaksaraan fungsional (KF) dan membudidayakan mina baca melalui taman bacaan masyarakat.

## 2. Pengembangan kehidupan beroprasi

Prioritas program kehidupan beroprasi dengan meningkatkan kelompok dan kualitas usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2KP) selain menumbuhkan kesadaran serta kemampuan berwirausaha keluarga juga sebagai usaha menciptakan dan memperluas lapangan kerja.

c. Pokja III sebagai pelaksana kegiatan program :

1. Pangan

Prioritas program pangan dengan mewujudkan ketahanan pangan keluarga melalui penganekaragaman pangan dengan pola pangan 3B (bergizi, beragam, berimbang) sesuai potensi daerah.

2. Sandang

Prioritas program sandang adalah mengupayakan baik paten untuk melindungi hak cipta desain dan mengupayakan keikutsertaan dalam pameran dan lomba baik tingkat lokal, nasional dan internasional. Meningkatkan kesadaran masyarakat menciptakan produksi dalam negeri (aku cinta produk Indonesia).

3. Perumahan dan tata laksana rumah tangga

Menumbuh keembakan kembali program pemugaran perumahan dan lingkungan desa terpadu (P2LDT) melalui pemugaran rumah layak huni terutama keluarga miskin dan pengungsi dengan asas Tri bina (bina usaha, bina manusia, dan bina lingkungan) gotong royong serta mengupayakan bantuan dari instansi/dinas terkait dan masyarakat.

d. Pokja IV sebagai pelaksana kegiatan program

1. Kesehatan

Kesehatan merupakan proiritas utam keluarga dengan memantapkan keluarga sadar gizi (KADARZI) dalam upaya menurunkan prefalensi anak balita kurang gizi, gizi seimbang untuk ibu hamil, ibu menyusui dengan pemberian suplemen zat gizi,

pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif selama enam (6) bulan, makanan pendamping (MP ASI) dan pemberian makanan tambahan bagi balita, lansia di posyandu, menjadikan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai kebiasaan sehari-hari dengan cuci tangan pakai sabun dan menggunting kuku.

## 2. Kelestarian lingkungan hidup

Lingkungan bersih dan sehat dengan menanamkan kesadaran tentang kebersihan pengelolaan kamar mandi dan jamban keluarga, saluran pembuangan air limbah (SPAL). Menanamkan kebiasaan sampah organik dan non organik serta bahan berbahaya dan beracun untuk mendaur ulang selanjutnya ditempatkan yang benar.

## 3. Perencanaan sehat

Meningkatkan kegiatan dalam program perencanaan sehat dengan meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya pemahaman dan kesertaan dalam program keluarga berencana dan berorientasi pada masa depan dengan cara menabung serta mengatur keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran keuangan keluarga, meningkatkan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin.

### 2.1.6 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan ialah proses kesadaran serta pembentukan kapasitas terhadap suatu partisipasi yang lebih besar kekuasaan dan pengawasan, pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan

transformasi agar dapat menghasilkan persamaan derajat yang sama antara laki-laki dan perempuan. Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki pada empat level yang berbeda yakni: keluarga, masyarakat, pasar dan Negara. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang terkait dengan kehidupan (Zakiya, 2010).

Menurut Nugroho (2008) tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam melibatkan diri kedalam program pembangunan sebagai bentuk partisipasi aktif (subjek) sehingga tidak hanya sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang selama ini terjadi.
2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam hal mengelola usaha skala rumah tangga industri kecil maupun besar agar dapat meningkatkan kebutuhan rumah tangga maupun untuk membuka peluang kerja yang produktif dan mandiri.
3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan untuk meningkatkan posisi tawar-menawar serta melibatkan pada setiap pembangunan baik secara perencanaan, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan ditingkat lokal sehingga wadah pemberdayaan kaum perempuan terlihat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

### 2.1.7 Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Peran pemerintah secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat maka peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat antara lain:

#### 1) Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator ialah untuk menyiapkan arah agar dapat menyeimbangkan penyelenggara pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator pemerintah juga memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala pelaksanaan pemberdayaan.

#### 2) Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisaor ialah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong serta memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan serta pengarahan yang instensif dan efektif kepada masyarakat, biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluhan maupaun badan tertentu dalam memberikan pelatihan.

#### 3) pemerintahan sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator ialah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjabatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.

Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan juga ketrampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat untuk membangun masyarakat secara optimal.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian terdahulu ini menjadi titik tolak ukur untuk peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun Penelitian terdahulu yaitu :

### 1. Penelitian Rusdi (2018)

Dalam Penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun” memiliki persamaan dalam hal tujuan penelitian dengan penelitian ini yaitu ingin mengetahui tentang keberhasilan dari Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, jika peneliti Rusdi (2018) meneliti Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan Siantar, maka penulis menitik beratkan pada satu Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) saja yaitu Pendidikan dan Keterampilan Perempuan di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa.

Adapun hasil penelitian Rusdi (2018) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten simalungun dalam proses komunikasi antar kader ke masyarakat belum berjalan dengan baik, dikarenakan sosialisasi yang masih kurang maksimal. Sumber daya manusia (SDM) di dalam organisasi (PKK) Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kecamatan Simalungun masih kurang mampu menjalankan dari sepuluh (10) program (PKK) secara baik. Disposisi di pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tidak berjalan sesuai dengan bidang masing-masing para kader. Maka implementasi kebijakan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar belum berjalan dengan baik.

## 2. Penelitian Jami'ah (2019)

Dalam Penelitiannya yang berjudul “Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Wanita di Desa Simatahari Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan” memiliki persamaan dalam hal tujuan penelitian dengan penelitian ini yaitu ingin mengetahui tentang Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, jika peneliti Jami'ah (2019) meneliti Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan wanitanya, maka penulis menitikberatkan pada satu Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) saja yaitu Pendidikan dan Keterampilan Perempuan di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa.

Adapun hasil penelitian jami'ah (2019) adalah pemberdayaan yang diterapkan (PKK) desa simantahari berupa pemberdayaan *life skill* yaitu ketua (PKK) memberikan bimbingan, memberikan peralatan ketrampilan, dan mengadakan pelatihan, serta melakukan pemasaran. Selanjutnya (PKK) dalam hal pemberdayaan kesehatan, PKK mengadakan posyandu setiap bulannya pada balita dan lansia, dan pemberian makanan tambahan (PMT). Sedangkan pada lansia yaitu mengadakan penyuluhan pola hidup sehat, mengadakan pemeriksaan kesehatan, dan mengadakan senam sehat setiap minggu.

### 3. Penelitian Mirnawati (2018)

Dalam penelitiannya yang berjudul “peran PKK (pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai” memiliki persamaan dalam hal tujuan penelitian dengan peneliti yaitu ingin mengetahui tentang Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, jika peneliti mirnawati (2018) meneliti program pemberdayaan dan kesehatan dan keluarga (PKK) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa aska. Maka penulis menitik beratkan pada program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan di desa naga timbul kecamatan tanjung morawa.

Adapun hasil dari penelitian minarwati (2018) adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) peran (PKK) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu masyarakat dapat meningkatkan kegiatan ekonomi keluarga dengan mengikuti pelatihan ketrampilan seperti menjahit dan membuat kerajinan tangan yang diterapkan di kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan pendapatan, 2). Hubungan solidaritas (PKK) dengan masyarakat berlangsung sangat baik karena saling membutuhkan satu sama lain, masyarakat membutuhkan tenaga kerja anggota (PKK) yang sudah ahli dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari contohnya tukang jahit, anggota (PKK) juga membutuhkan bantuan masyarakat dalam memenuhi bahan baku yang mereka butuhkan dalam membuat sebuah kerajinan contohnya batang enceng gondok yang akan mereka gunakan untuk membuat anyaman.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Menurut sugiyono (2017: kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubung dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.

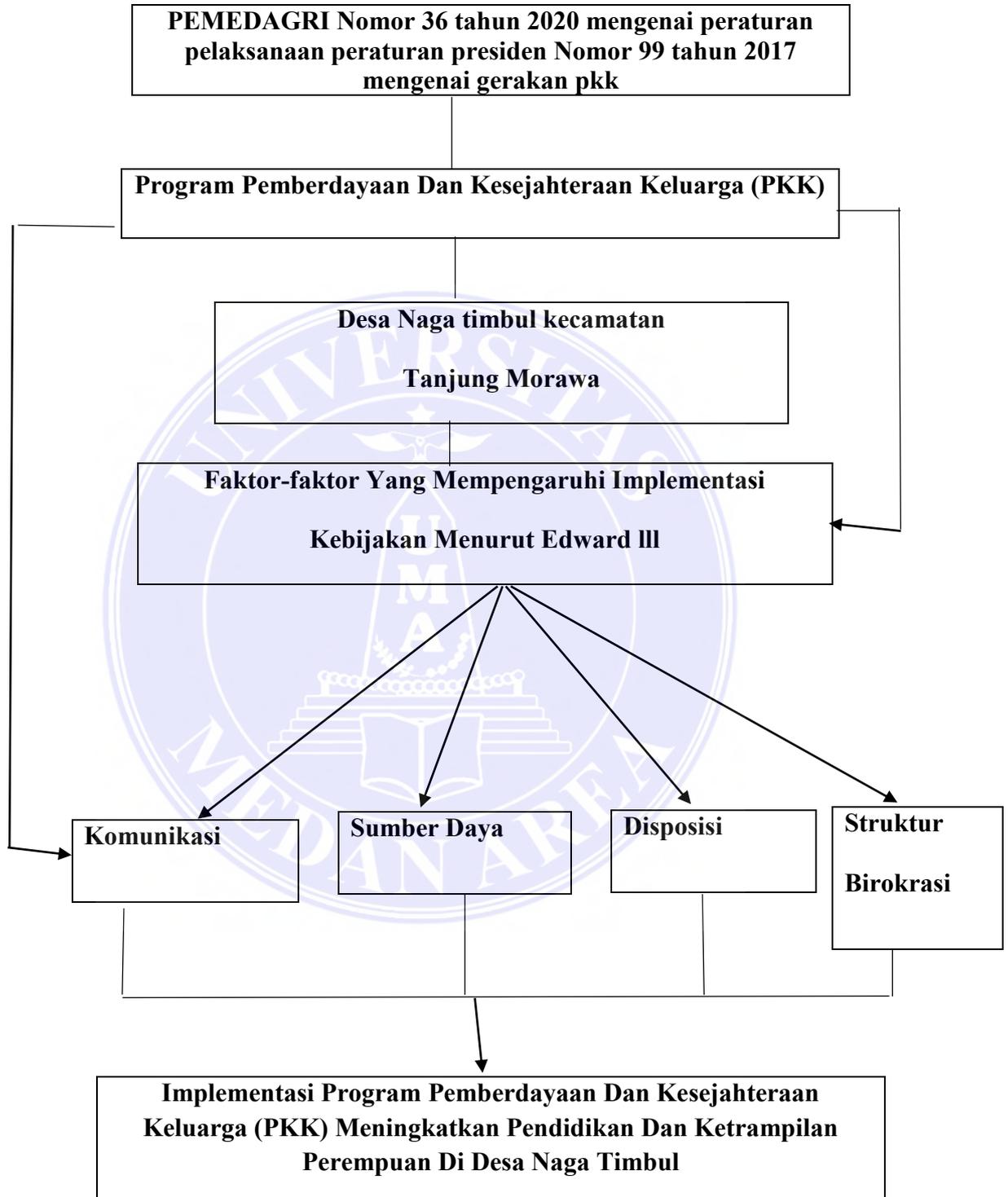
Untuk mengetahui Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan keluarga Dalam Meningkatkan Pendidikan Dan ketrampilan Perempuan Di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa dengan ini peneliti menggunakan Model Implementasi menurut George Edwards III yakni empat variable yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dengan hal itu Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan keluarga Dalam

Meningkatkan Pendidikan Dan ketrampilan Perempuan Di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa dapat diukur.

Berikut kerangka pemikiran yang digambarkan peneliti dari “Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pendidikan Dan Ketrampilan Perempuan Di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa”. Sebagai berikut :

Dimulai dari peraturan pemerintah dalam negeri (pemedagri) Nomor 36 tahun 2020 mengenai peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 99 tahun 2017 mengenai gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, yang mempunyai program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di desa naga timbul, serta teori Edward III yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan PKK di desa naga timbul yang mempunyai indikator yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi hasil akhirnya ialah untuk mengimplementasikan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan perempuan di desa naga timbul.

### Bagan 2.3 Kerangka Pemikiran



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu dengan cara memandang objek penelitian sebagai suatu sistem, artinya objek kajian dilihat dari satuan yang terdiri dari unsur yang saling terkait serta mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada (suharsimi Arikunto, 2003:209). Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertentu atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy Moleong, 2005:3). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang merupakan menggambarkan penjelasan dari variable yang akan diteliti.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai penelitian deskriptif kualitatif diatas, penelitian ini berupaya menggambarkan realita sosial dalam Implementasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pendidikan Dan Ketrampilan Perempuan Di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Naga timbul kecamatan tanjung morawa. Penelitian dilaksanakan selama empat bulan yakni januari, februari, maret, april 2022.

**TABEL 3.2**  
**WAKTU PENELITIAN**

N	Uraian	Okto	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu
O	kegiatan	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1.	Pengajuan Judul											
2.	Bimbingan proposal											
3.	Sempro											
4.	Pencitian											
5.	Semhas											
6.	Perbaikan											
7.	Sidang											

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk memperoleh data di lapangan, adapun beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Menurut arikunto (2006:155) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang di wawancarai.

Informan dalam wawancara sebagai berikut:

##### a.) Informan kunci

Informan kunci ialah seorang yang tahu secara keseluruhan tentang permasalahan yang sedang peneliti angkat. Dalam penelitian program implementasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang akan menjadi informan kunci ialah Ketua PKK di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa ibu Liana Umar Daulay.

##### b.) Informan utama

Informan utama ialah seseorang yang mengetahui secara teknis serta detail mengenai permasalahan yang akan peneliti angkat. Dalam penelitian implementasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang menjadi informan utama ialah ibu Ida Haryanti Sujadi sebagai sekretaris dan ibu Ernida Muklis sebagai bendahara, ibu riski anggota dibidang pendidikan dan ketrampilan serta bapak rames selaku pegawai kantor desa naga timbul

c.) Informasi tambahan

Informan tambahan ialah seseorang yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap kedalam pembahasan pada penelitian kualitatif dan juga informan tambahan memberikan informasi yang belum disampaikan oleh informan kunci dan informan utama. Untuk itu yang menjadi informan tambahan adalah ibu-ibu desa naga timbul sebanyak 4 (empat) orang ibu ratna, ibu nana, ibu apri dan ibu kalsum .

**b. Observasi**

Menurut Husain usman (2011:52) observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, dilakukan secara langsung pada objek penelitian dengan cara non parsifatif artinya tidak ikut serta dalam proses kerja dan mencatat hal yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

**c. Dokumentasi**

Menurut sugiono (2016:240) dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan. Pemanfaatan dokumentasi sebagai salah satu sumber data merupakan hal yang sangat penting karena dapat membantu penulis dalam merumuskan hasil penelitian. Banyak alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan digunakan dokumen, yaitu dokumen merupakan sumber yang stabil, dan mendorong. Dokumen berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap suatu yang sedang diteliti.

### 3.4 Metode Analisis Data

Menurut sugiyono (2016:246) metode analisis data adalah aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

Menurut sugiyono (2016:247) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan.

#### 2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel dan sejenisnya. Dengan mengdisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

#### 3. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Setelah data disajikan maka dilakukan pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara

dari yang semula belum jelas menjadi lebih jelas dan terperinci dengan cara verifikasi dalam arti meninjau ulang catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan serta penyajian data dan pembahasan yang diperoleh, maka kesimpulan yang peneliti buat dengan judul “implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam meningkatkan pendidikan dan ketrampilan perempuan di desa naga timbul kecamatan tanjung morawa”, yaitu:

1. Implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam meningkatkan pendidikan dan ketrampilan perempuan di desa naga timbul kecamatan tanjung morawa masih belum berjalan dengan baik, dilihat dari proses pelaksanaannya yang masih jauh dari kata berhasil. Hal ini dapat dibuktikan dari tingkat keberhasilan pelaksanaan program (PKK) dalam meningkatkan pendidikan dan ketrampilan kurang dirasakan peningkatannya oleh penerima program ini. serta sumber daya manusia masih kurang walaupun sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya namun hal itu belum sesuai dengan yang diharapkan. Namun dari *skill* mentor cukup untuk memberikan ilmu kepada para anggota yang mengikuti program (PKK) di desa naga timbul. Dilihat dari disposisi/sikap, para pelaksana sudah cukup berkomitmen dalam menjalankan tugasnya dan perannya masing-masing dan didorong dengan semangatnya para pelaksana hal itu cukup dapat untuk diapresiasi. Walaupun ada perbedaan pendapat hal itu bukanlah menjadi hambatan. Dilihat dari struktur organisasi, pada program pemberdayaan

dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam meningkatkan pendidikan dan ketrampilan perempuan di desa naga timbul kecamatan tanjung morawa secara pemisahan tugasnya sudah jelas dan dapat dipahami namun yang menjadi kendala terdapat di bagian SOP nya masih dalam tahap pembahasan, para anggota melakukan prosedur-prosedur kerja nya masih di tahap pembahasan sehingga tidak ada keseragaman antara para pelaksana dalam menjalankan tugasnya.

2. faktor penghambat dalam pengimplementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam meningkatkan pendidikan dan ketrampilan perempuan di desa naga timbul didapatkan dari hasil wawancara yakni:

A. faktor pengurus melalui implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam meningkatkan pendidikan dan ketrampilan, dilakukannya kegiatan sosialisasi adalah kurang maksiman dan konsisten. Hal ini dibuktikan dari ketidakpahaman masyarakat ibu-ibu yang mengikuti program (PKK) dengan tujuan yang dilaksanakannya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini ditunjukan dari pihak pemerintah dan pesertanya. Serta kemampuan kader dalam melakukan pengarahannya yang menimbulkan kurangnya respon dan minat masyarakat.

B. faktor masyarakat dari pelatihan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), peserta yang mengikuti pelatihan pendidikan dan ketrampilan tidak adanya peningkatan yang signifikan, dikarenakan cara berpikir ibu-ibu dalam mengikuti

pelatihan pendidikan dan ketrampilan ini masih kurangnya kesadaran dan keseriusan. Sarana transportasi juga menjadi kendala dalam mengimplementasikan program (PKK) dalam meningkatkan pendidikan dan ketrampilan perempuan di desa naga timbul. Hal ini dapat membuat pelaksanaan program (PKK) menjadi tidak maksimal, serta masih banyak nya masyarakat yang masih belum paham dengan adanya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sehingga kurang partisipasi dari masyarakat.

## 5.2 SARAN

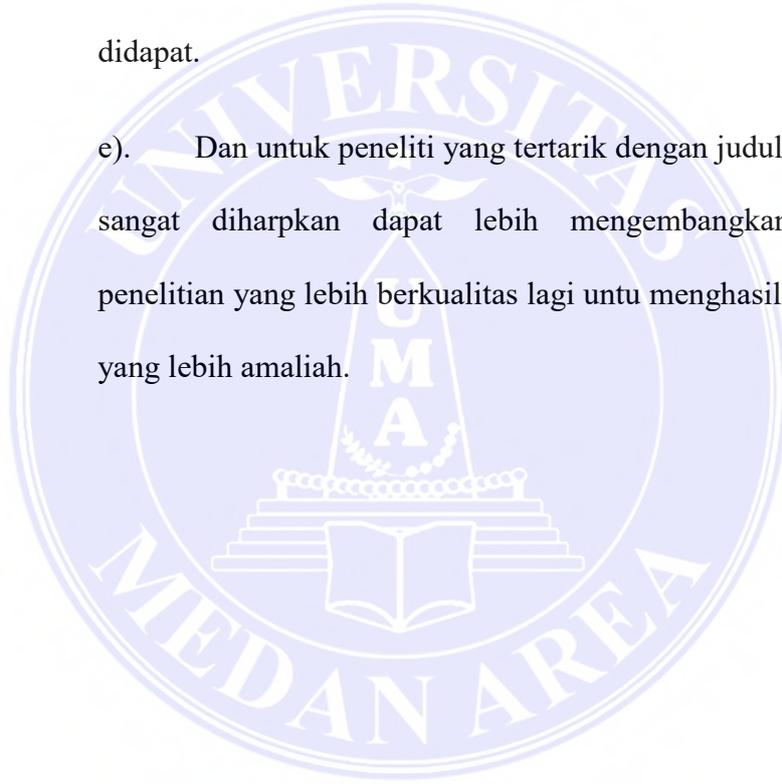
Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan dan kesimpulan yang peneliti buat, peneliti memberikan saran akan “ Implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam meningkatkan pendidikan dan ketrampilan perempuan di desa naga timbul kecamatan tanjung morawa” yaitu:

- a). Untuk anggota (PKK) di desa naga timbul agar bisa lebih aktif lagi dalam menjalankan program-program (PKK), terutama dalam pendidikan dan ketrampilan perempuan.
- b). Untuk anggota dan pengurus (PKK) di desa naga timbul sebaiknya pelatihan *life skill* tidak hanya berfokus kepada anggota saja, namun masyarakat diluar (PKK) seharusnya juga dapat pemberdayaan dalam pelatihan *life skill*.
- c). Untuk masyarakat sendiri saran dari peneliti pemikiran mengenai (PKK) yang hanya menghabiskan waktu saja berada

diluar rumah sebaik nya mulai dari sekarang diubah bahwa mengikuti (PKK) dapat menambah wawasan baru juga.

d). untuk pengurus (PKK), masyarakat perlu dorongan serta motivasi terkhusus perempuan di lingkungan sekitar agar terus meningkatkan kemampuan serta ketrampilan nya agar nanti nya dapat digunakan serta hal itu dapat membantu meningkatkan nilai ekonomi keluarga sendiri berbekal dari ketrampilan yang sudah didapat.

e). Dan untuk peneliti yang tertarik dengan judul penelitian ini, sangat di harapkan dapat lebih mengembangkan metodologi penelitian yang lebih berkualitas lagi untu menghasilkan penemuan yang lebih amaliah.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdul Wahab, Solichim. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke implementasi kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, 2006. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Harsono, Hanifah, *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya, 2002
- Husain, Usman. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Pasalong, harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:PT Alfabet.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:PT Alfabet.
- Suharsimi Arikunto. (2003). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lexy Moleong. (2005) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdaka
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo.
- Nugroho. 2008. *Gender dan administrasi publik studi tentang kualitas kesetaraan dalam administrasi publik Indonesia pasca reformasi 1998-2002*. Yogyakarta:pustaka pelajar.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia

## Peraturan Pemerintah Dalam Negeri:

Peraturan pemerintah No . 5 Tahun 2007 Tentang *pedoman penataan lembaga kemasyarakatan*

Kementrian dalam negri No. 36 Tahun 2020 *Tentang pelaksanaan peraturan presiden No. 99 Tahun 2017 Tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.*

## Jurnal :

Rumayah. (2015). *Pelaksanaan program pemberdayaa dan kesejahteraan keluarga (pkk) dalam pemberdayaan masyarakat di desa maliau*

Wildan Sauugi, Sumarno 2015 pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Nurazmi izmi rusdi, 2018. “Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di nagori siantar estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.” *Skripsi fakultas ilmu dan social dan ilmu politik: Medan. Universitas Medan Area.*

Jam’ah Harahap, 2019. “ Peran Pemeberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Dalam pemberdayaan wanita di desa simatari kecamatan kota pinang kabupaten labuhan batu selatan”. *Skripsi fakultas dakwah dan komunikasi. Medan. UIN Sumatra Utara.*

Mirawati, 2018. “peran pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa aska kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai”. *Skripsi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Makassar. Universitas muhammadiyah.*

Zakiya. 2010. “pemberdayaan perempuan oleh lajnah wanita”. *Jurnal pengkajian masalah social keagamaan, No XVII.*

## LAMPIRAN 1 Pedoman Wawancara

### Daftar pertanyaan untuk informan kunci:

1. Sebelum program PKK dilaksanakan, apakah sudah ada sosialisai yang dilakukan.
2. Apakah tim pengurus PKK rutin memberikan informasi mengenai program PKK khususnya pendidikan dan keterampilan.
3. Adakah program ataupun aplikasi yang digunakan untuk berkomiikasi dengan pengurus.
4. Bagaimana antusiasme ibu-ibu terhadap program PKK terkhusus pendidikan dan ketrampilan.
5. Bagaimana keaktifan kader dalam program PKK.
6. Bagaimana program PKK ini terkait meningkatkan pendidikan dan ketrampilan perempuan di desa naga timbul?
7. Apakah para pelaksana memberikan informasi kepada masyarakat?
8. Apakah sebelum masuk ke tahap ketrampilan ibu-ibu diberikan materi pendidikan terlebih dahulu?
9. Apakah pemerintah desa mendukung program (PKK) di desa naga timbul?

### Daftar pertanyaan untuk informan utama:

1. Apakah program PKK memiliki standar skill yang harus dimiliki.
2. Apakah mengikuti PKK menambah wawasan baru.
3. Apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program PKK khususnya pendidikan dan ketrampilan.
4. Apakah dengan mengikuti program PKK dalam meningkatkan pendidikan dan ketrampilan dapat meningkatkan produktifitas perempuan di desa naga timbul.
5. Apakah ada evaluasi dan monitoring dalam pemberian materi?.
6. Bagaimana cara berkomunikasi mentor terhadap peserta pelatihan?
7. Apakah ada aplikasi yang digunakan?
8. Apakah ada perintah untuk dilakukan sosialisasi ke masyarakat?
9. Apakah mentor dalam memberikan pelatihan sudah mengikuti SOP?
10. Apakah struktur birokrasi di desa naga timbul mengalami masalah?
11. Bagaimana rencana kerja PKK?

**Daftar pertanyaan untuk anggota masyarakat :**

1. Apakah dengan adanya program pendidikan dan ketrampilan dari PKK dapat meningkatkan perekonomian desa?
2. Apakah PKK di desa naga timbul sudah sesuai dengan yang diharapkan.
3. Adakah harapan untuk PKK di desa naga timbul.
4. Bagaimana cara berkomunikasi antara pelaksana dengan para ibu-ibu yang mengikuti pelatihan?
5. Apakah dengan mengikuti PKK khususnya pendidikan dan ketrampilan dapat menambah wawasan.
6. Apakah ada perintah untuk memberikan sosialisasi ke pada masyarakat?
7. Apakah ada peningkatan setelah mengikuti pelatihan pendidikan dan ketrampilan ?
8. Bagaimana kondisi atau keadaan ibu-ibu di desa naga timbul jika dilihat dari ekonomi dan pendidikannya?

## LAMPIRAN 2

### 1. Foto wawancara bersama ibu deliana



### 2. Foto bersama ibu fitri



### 3. Foto bersama kader PKK



### 4. Foto bersama ibu deliana

